



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik



secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026**

No	Indikator	Realisasi Tahun		RKPD	Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,27	0,91	1,71	2,39	3,23	4,38
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,9	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,14	2,44	2,42	2,40	2,36	2,32
4	Indek Pembangunan Manusia	67,95	68,75	69,32	69,90	70,48	71,07
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,65	82,65	83,67	84,94	86,20	87,47
6	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B	B	B
7	Indeks Gini	0,27	0,288	0,274	0,260	0,248	0,236
8	PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku	90,17	94,51	100,42	106,71	113,39	120,48



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Realisasi Tahun		Target RKPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	85,38	90,17	94,51	100,42	106,71	113,39	120,48	120,48
2	Indek Pembangunan Manusia	67,09	67,95	68,75	69,32	69,90	70,48	71,07	71,07
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,44	11,9	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09	10,09
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,22	1,27	0,91	1,71	2,39	3,23	4,38	4,38
5	Indeks Gini	0,259	0,270	0,288	0,274	0,260	0,248	0,236	0,236
6	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	8,81	8,36	8,46	9,00	9,21	9,26	9,26
7	Harapan Lama Sekolah	12,51	12,61	12,62	12,70	12,80	13,00	13,20	13,20
8	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,33	72,35	72,49	72,64	72,78	73,15	73,15
9	Tingkat pengangguran terbuka	3,49	3,14	2,44	2,42	2,4	2,36	2,32	2,32
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	5,00%	5%	5%	5%	5%	30%
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,12	80,65	82,65	83,67	84,935	86,2	87,47	87,47
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	77,90	50	61,88	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	82,78	93,98	92,56	93,56	94,56	96,06	97,56	97,56
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	79,00	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	B	B	B
7	Predikat SAKIP	CC (50,09)	CC (50,57)	CC (50,98)	CC (51,87)	CC (52,78)	CC (53,70)	CC (54,63)	CC (54,63)



8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	na	98,34	n.a	98,44	98,54	98,64	98,74	98,74
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	APK PAUD	100,42	109,7	73,02	80,35	80,73	90,27	90,47	90,47
2	APM SD/MI	89,29	90,15	74,91	80,73	90,15	90,36	90,78	90,78
3	APK SD/MI	102,16	100,68	82,16	100,60	100,70	100,80	100,90	100,90
4	APM SMP/MTs	69,77	90,15	63,55	71,30	71,75	72,65	73,00	73,00
5	APK SMP/MTs	97,40	98,03	82,16	90,00	93,55	98,33	100,00	100,00
6	APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75	80,74	80,50	80,60	80,80	90,00	90,00
7	APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03	99,35	99,40	90,45	90,57	90,67	90,67
8	APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51	0,52	2,53	3,85	4,55	5,67	5,67
9	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	80,00%	84,00%	86,00%	92,00%	93,00%	93,00%
11	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	0%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	na	100,00%	95,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Persentase Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar	na	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Angka usia harapan hidup	72,10	72,3	72,3	72,49	72,64	72,78	73,15	73,15
2	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	0,27	0,15	0,10	0,5	0	0
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9	17	7	6	5	4	4
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2	0	2	1	1	0	0



5	Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1 : 50 balita	1 : 50 balita	1 : 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita	1: 50 balita
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,17	1,20	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8	Prevalensi stunting	27%	11%	7%	18%	14%	12%	10%	10%
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100	1	70	50	40	40	40
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%	100%	91%	92%	93%	94%	94%
11	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039	0.00063	0.56	0,53	0,50	0,47	0,47
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus	143 Kasus	41 Kasus	41 Kasus	41 Kasus	42 Kasus	42 Kasus
13	Angka kejadian Malaria	14	14	11	0	0	0	0	0
14	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14	0.05	2	2	1	1	1
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98	99	100%	97,00	98,00	98,00	98,00
16	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	1 : 70	1 : 70	1 : 80	1 : 83	1 : 86	1 : 86
17	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90	1 : 90	1 : 90	1 : 66	1 : 68	1 : 70	1 : 70
18	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%	16.66%	90%	90%	90%	90%	90%
19	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
21	Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100%	100%	-	50%	50%	50%	50%
22	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100%	100%	75%	76%	77%	78%	78%
23	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,20%	3,20%	3,20%	5%	10%	15%	20%	20%
24	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB	21 KLB	1573	260	23 KLB	24KLB	25KLB	26 KLB	26 KLB
25	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-	-	-	20%	40%	60%	60%



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	88%
2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	33,00%	33,00%
3	Capaian Akses Air Limbah Layak	tda			10,00%	15,00%	20,00%	23,00%	23,00%
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda			15%	15%	25%	30%	30%
5	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
6	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	tda	0,23	0,38	0,53	0,68	0,83	0,98	0,98
7	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	na	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	5,00%	5%	5%	5%	5%	30%
9	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	tda	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
10	Ketaatan terhadap RTRW	tda	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%			30,43%	35,43%	40,43%	50,43%	50,43%
2	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%			30,43%	35,43%	45,43%	55,43%	55,43%
4	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	15,43%			47,43%	59,43%	74,43%	89,43%	89,43%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									



1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	98%	98%	100%	100%	100%	75%	75%
2	Persentase Penegakan PERDA	75%	0%	82%	75%	75%	80%	75%	75%
3	Cakupan pelayanan kebencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kampung Tangguh Bencana	5 %	9%	0%	4%	12%	20%	30%	30%
5	Cakupan Penanggulangan Bencana	3 kampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	tda	60%	70%	80%	80%	80%	100%	100%
7	Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	tda	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45
8	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	72%	72%	81%	91%	100%	100%
3	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	66,67	66,67	66,67	83,33	100	100%
4	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	66,67	66,67	66,67	83,33	100%	100%
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0%	80%	70%	80%	90%	100%	100%
2	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	10%	20%	30%	40%	50%	50%



3	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0%	65%	70%	75%	80%	85%	100%	100%
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0%	55%	65%	75%	85%	95%	100%	100%
5	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	0%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
7	Rasio KDRT	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
9	Indeks Kesetaraan Gender	0%	60%	70%	80%	90%	96%	100%	100%
10	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
11	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0%	40%	60%	70%	76%	80%	90%	100%
12	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	0%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	107%	108%	109%	110%	110%	110%
2	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	92,8	94	95,2	96,2	97,98	98,98
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14%	13.50%	42%	35%	25%	15%	10%	10%



4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	na	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88
3	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	50%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
5	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	na	0	0	2 Kel/Org	2 Kel/Org	2 Kel/Org	2 Kel/Org	8 Kel/Org
8	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	na	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	99,35%	99,50%	99,65%	99,80%	100,00%	100,00%
2	Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Admuduk	62%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
4	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



5	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	94%	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
6	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	86%
2	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	5	5	5	5	5	5
3	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	28	34	40	46	52	52
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6	42	50	58	66	74	82
6	Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%	21,6%	24,6%	27,6%	30,6%	33,6%	33,6%
7	Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%	6,0%	8,0%	10,0%	12,0%	14,0%	14,0%
8	Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%	63,0%	66,0%	69,0%	72,0%	75,0%	75,0%
9	Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%	52,0%	54,0%	56,0%	58,0%	60,0%	60,0%
10	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%	28,0%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									



1	Total Fertility Rate	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
2	Ratio Akseptor KB	73%	80%	81%	75%	76%	77%	78%	78%
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	600 KK	350 KK	400 KK	450 KK	500 KK	500 KK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase layanan angkutan darat	0	0	0	0	0	0	5%	5%
2	Rasio Ijin Trayek	0	0	0	0	0	0	5%	5%
3	Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	5%	5%
4	Pemasangan Rambu-rambu	10	0	0	20	25	30	35	35
5	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0	0	0	0	0	10%	10%
6	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	10%	10%
7	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton	20.379Org /43.393 ton	15200 Org/150 ton	15500 Org/170 ton	15700 Org/200 ton	16000 Org/ 220 ton	16000 Org/ 220 ton
8	Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637	20379	800	820	850	870	870
9	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	3652	5900	6000	6500	7000	7000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 KIM	0 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	1 KIM	5 KIM
2	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpn pinjam	na				100%	100%	100%	100%
2	Presentase Koperasi yang diawasi	na				100%	100%	100%	100%



3	Presentase KSP/USP Sehat	na				25%	50%	75%	75%
4	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	na				50%	75%	100%	100%
5	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	na				50%	75%	100%	100%
6	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na				50%	75%	100%	100%
7	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na				25%	50%	75%	75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	38 Proyek	55 Proyek	63 Proyek	73 Proyek	84 Proyek	84 Proyek
2	Jumlah Investor	na	0%	0%	55 investor	63 investor	73 investor	84 investor	84 investor
3	Cakupakan Pelyanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase investor yang ber investasi	43%	0%	0%	55%	60%	65%	70%	70%
5	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	0%	0%	0%	13%	13%	50%	63%	63%
2	Persentase wirausaha muda	0%	0%	0%	0%	0%	22,73%	25,45%	25,45%
3	Presentasi Pemuda yang dibina	0%	0,06%	0,24%	0,24%	0,20%		0,60%	0,60%
4	Cakupan pembinaan olahraga	17	0	14	32	33	36	37	37
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	12,50%	0,00%	62,50%	81,08%	81,08%
6	Cakupan pembinaan atlet muda	0	0	0		20,00%	30,00%	40,00%	40,00%
7	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif		0	0	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	41,67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	0%	0%	25%	30%	40%	50%	50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									



1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0%	0%	20%	30%	45%	50%	50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0%				100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pembinaan Sejarah	0%				100%	100%	100%	100%
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengelolaan Permuseuman	0%					100%	100%	100%
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	na	10%	10%	15%	20%	30%	40%	40%
7	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	na	11	15	16	17	18	19	19
8	Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	na	10	10	15	20	30	40	40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.587 Pengunjung	1.587 Pengunjung	1.600 Pengunjung	1.650 Pengunjung	1.700 Pengunjung	1.750 Pengunjung	1.800 Pengunjung	1.800 Pengunjung
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5963 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	1.200 Judul	6.000 Judul
3	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	0	0	15	15	20	25	30	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	0%	40%	50%	50%	55%	60%	60%
2	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0%	50%	60%	65%	70%	70%	70%
3	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	0%	0%	40%	50%	55%	60%	60%	60%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	330 Ton	345 Ton	350 Ton	365 Ton	380 Ton	380 Ton



2	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	150 Ton	165 Ton	180 Ton	195 Ton	110 Ton	110 Ton
3	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	50%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%
4	Persentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	0%	4%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Jumlah Destinasi/ Fasilitas/ dokumen	4	6	16	29	29	29	29	29
2	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	10	30	50	55	60	215
3	Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700	3000	200	300	350	400	6950
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata	na	0%	0%	2%	3%	3%	4%	12%
5	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan	20	25	60	70	85	105	130	130
6	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	35%	20%	20%	20%	20%	20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2,08	2,39	2,63	2,89	3,18	3,18
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,90%	2,00%	2,10%	2,10%
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%	3,40%	3,50%	3,60%	3,70%	3,80%	3,80%
4	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%	1,40%	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,80%
5	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	3.600	4.000	4.200	4.500	4.500	23.800
6	Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha	750 Ha
7	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha
8	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,50%	80,50%	80,10%	80,80%	81,60%	82,80%	83,50%	83,50%



9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,00%	90,10%	90,20%	90,30%	90,40%	90,50%	90,60%	90,60%
10	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	10.00%	40%	50%	60%	70.00%	80%	90%	90%
11	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP
12	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga	450 Lembaga	500 Lembaga	550 Lembaga	600 Lembaga	650 Lembaga	650 Lembaga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	20%	40%	60%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pengusaha yang dibina	0 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha	2 Pengusaha
5	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	na	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan
6	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Jumlah IKM yang dikembangkan	na	1 IKM	1 IKM	3 IKM	3 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM
2	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
SEKRETARIAT DAERAH									



1	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	na	63.97%	71.09%	50%	50%	60%	80%	95%
SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
1	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
2	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
4	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
5	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%	95%	96%	96%	96%	97%	97%
KEUANGAN									
1	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	64%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	64%	66%	68%	69%	70%	70%
KEPEGAWAIAN									
1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	75,00%	80,00%	80,00%	82,50%	85,00%	85,00%



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	78,00%	81,00%	81,00%	82,50%	84,00%	84,00%
2	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20%			20%	40%	40%	60%	60%
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			20%	20%	40%	60%	60%
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	na			30%	60%	80%	90%	90%
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na			10%	50%	60%	80%	80%
PENGELOLA PERBATASAN									
1	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	na		21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%	100%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INSPEKTORAT DAERAH									
1	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	75%	79%	82%	86%	89%	89%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	42%	54%	58%	59%	59%	59%	60%	60%
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%	83%	84%	84%	84%	85%	85%
4	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%	43.1%	50%	51%	52%	53%	53%
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN LONG BAGUNG									



1	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Bagun	100%	100%	100,00%	0,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	40,00%	0,00%	80%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100%	100%	100,00%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	3	4	5	10	11	11
KECAMATAN LONG APARI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Apari	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN LAHAM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Laham	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100



KECAMATAN LONG HUBUNG									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Hubung	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN LONG PAHANGAI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Long Pahangai	na	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70
2	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	12%	10%	5%	5%	5%	5%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	98%	90%	92%	93%	94%	95%	97%	97%
2	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	82%	86%	87%	90%	92%	92%	92%
3	Persentase Ormas/LSM yang dibina	89,17%	80%	84,00%	86,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90%
4	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	98%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
5	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	82,82%	83%	85%	87%	89%	90%	92%	92%

